

PEDOMAN KOORDINASI - PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 72 TAHUN 2022/LD NOMOR 72 TAHUN 2022

TENTANG PEDOMAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
WONOSOBO

ABSTRAK:

- Bawa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu adanya keselarasan dalam pelaksanaan tugas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan oleh Perangkat Daerah. dengan adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019, perlu mengubah dan menyesuaikan pedoman koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Wonosobo. Dengan terbitnya Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo sudah tidak sesuai, Sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019;
- Peraturan Bupati ini mengatur maksud, tujuan, penyelenggaraan koordinasi, pengoordinasian perangkat daerah, staf ahli, rapat koordinasi, koordinasi kecamatan, koordinasi perangkat daerah dengan pihak ketiga, penandatanganan naskah dinas, pelaporan, serta pemanfaatan teknologi informasi.

CATATAN:

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2022.
- Mencabut Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2017.